

Judul : Sritex: Dukungan Bukan Berupa Dana Talangan
Tanggal : Kamis, 31 Oktober 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1

SRITEX

Dukungan Bukan Berupa Dana Talangan

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan dukungan pemerintah terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex bukan berbentuk dana talangan. Dukungan yang sedang dipertimbangkan adalah memastikan kasasi kasus pailit Sritex berjalan optimal melalui bantuan kurator dan mengkaji ulang regulasi ekspor-impor.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX

DPR, Rabu (30/10/2024), di Jakarta.

"Kami sudah menyampaikan kepada Sritex agar tidak ada PHK (pemutusan hubungan kerja) sambil menunggu proses kasasi. Kami menyadari ada (pengaruh) isu regulasi ekspor-impor sehingga isu ini pun sudah kami *sounding* ke Kementerian Perindustrian," kata Yassierli.

Dia menekankan, maksud pemerintah membantu Sritex tidak dimaknai bahwa pemerintah akan memberikan dana

talangan. Pemerintah mempertimbangkan membantu memastikan kasasi berjalan dengan optimal dan mengkaji ulang dari sisi regulasi, seperti regulasi ekspor-impor.

Dia menambahkan, akan ada bantuan kurator dari pemerintah dalam kasus Sritex yang bertugas memastikan proses produksi tetap berjalan dan hak pekerja diberikan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial

(Bersambung ke hlm 15 kol 3-5)

Dukungan Bukan Berupa Dana Talangan

(Sambungan dari halaman 1)

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menyebutkan, kurator biasanya hadir ketika perusahaan dinyatakan pailit. Perannya ialah menilai aset-aset dan kewajiban perusahaan. "Kurator saat ini sedang bekerja sambil menunggu hasil putusan Mahkamah Agung," ucap Indah.

PHK

Mengenai potensi PHK dari kasus yang dialami Sritex dan pengaruhnya terhadap total kasus PHK nasional, Indah menegaskan, Presiden Prabowo Subianto sudah mengamanatkan agar tidak ada PHK.

Menyoal angka PHK, Indah menyebutkan, dari Januari hingga 28 Oktober 2024, PHK secara nasional telah menyasar lebih kurang 59.796 orang. Dia tidak bisa memperkirakan jumlah sampai akhir tahun 2024 karena angka kasus terus bergerak setiap hari. Pihaknya hanya berharap agar publik tetap bersikap positif.

Ketika ditanya tentang detail

jumlah PHK, Indah melanjutkan, provinsi dengan kasus terbanyak adalah Jakarta (14.501 orang), Jawa Tengah (11.252 orang), dan Banten (10.524 orang). Salah satu sektor industri yang paling banyak melakukan PHK ialah sektor jasa.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar, Yahya Zaini, berpendapat, PHK bukan fenomena tunggal. Menurut dia, ada pengaruh kebijakan pemerintah yang salah.

Dalam konteks maraknya PHK di sektor industri tekstil dan produk tekstil, ia menduga ada peran kesalahan pemerintah dalam membuat kebijakan ekspor-impor, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 2024 sehingga pasar domestik dibanjiri produk dari luar negeri dengan harga lebih murah. Akar permasalahan seperti ini seharusnya digali oleh pemerintah supaya PHK tidak meluas.

"Saya mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam menyikapi kasus Sritex. Cuma, kasus yang dialami Sritex itu terdiri atas banyak faktor. Selain

isu industri, ada juga faktor internal, seperti mengapa hanya satu pemberi pinjaman yang mengajukan pailit, sementara pemberi pinjaman ke Sritex banyak," kata Yahya.

Secara terpisah, pelaku industri padat karya berharap, di tengah kondisi berat saat ini, pemerintah bisa memberikan keringanan lewat berbagai kebijakan. Salah satunya, kembali memberikan insentif Pajak Penghasilan (PPh 21) ditanggung pemerintah alias pembebasan Pajak Penghasilan bagi karyawan seperti yang pernah diterapkan saat pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2021. Selain itu juga dengan memberi kepastian seputar kebijakan upah minimum.

Usul tersebut disampaikan sejumlah pengusaha manufaktur padat karya yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan tertutup selama sekitar dua jam yang digelar di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (30/10).

(MED/AGE)